

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi masyarakat yang memiliki ras, suku, bahasa dan adat yang berbeda salah satu sistem yang menganut demokrasi adalah indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan pancasila masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pembagian tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangsikan ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. (Miriam Budiardjo, 2008:106) Dan disamping itu Indonesia memiliki pemimpin dan masyarakatnya tetapi dalam hal ini ada yang namanya politik yang merupakan bagaimana pemimpin menjalankan Negara ini dengan politik. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*. Dan mengapa politik begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik bagaimana caranya mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha dapat dicapai dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki

kekuasaan suatu wilayah tertentu (Negara atau sistem politik). Kekuasaan itu perlu di jabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Dengan demikian pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu Negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*) pengambilan keputusan , kebijakan public, dan alokasi atau distribusi.(Miriam Budiardjo, 2008:14)

Dewasa ini definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah terdesak oleh definisi-definisi lain yang lebih menekankan pada upaya (*means*) untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl: “politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*). Betapa samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik.Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.(Miriam Budirdjo, 2008:15)

Di negara demokrasi, kegiatan ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik.Tetapi tidak dapat disangka bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan politik disamping segi-segi baik, juga mencakup segi-segi yang negatif. Hal ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat

manusia, baik nalurnya yang baik maupun nalurnya yang buruk. Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari kita acapkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji, atau seperti dirumuskan oleh Peter Markl sebagai berikut: "politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri". Ada dua sarjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus.

1. Menurut Rod Hague et al.: "politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.
2. Menurut Andrew Heywood: "politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Miriam Budiardjo (2008:16)

Dan di Indonesia ini terbagi dalam berbagai kota dan wilayah, dan di dalam suatu kota ataupun wilayah memiliki suatu pemerintahan yang memiliki sistem politiknya dan dalam hal ini bisa disebut dengan politik lokal.

Politik lokal merupakan semua kegiatan politik yang berada pada level lokal, dalam hal ini diantaranya kota, kabupaten, dan desa. Politik lokal berkaitan dengan politik seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah, maupun pemilihan kepala desa daerah. Dalam politik lokal pemerintahan nasional tidak dapat berperan secara penuh, karena politik lokal cakupannya berada dibawah tingkat nasional. Hal ini terjadi karena dalam setiap tatanan lokal

sudah memiliki peraturan dan kebijakan daerah masing-masing. Politik lokal dapat diartikan sebagai pasar lokal yang menyediakan pelayanan publik, pemerintahan lokal juga dianggap sebagai penyedia layanan yang baik bagi masyarakatnya karena lebih dapat mengerti kebutuhan rakyatnya. Politik lokal secara harfiah adalah bagian dari suatu sistem politik yang dijalankan oleh suatu Negara. Konteks lokal dalam hal ini menyiratkan pada pemaknaan heterogenitas masyarakat lokal yang memiliki kesejahteraan, situasi batin dan psikologis yang berbeda. Kondisi tersebut memberikan kontribusi pada praktek politik di daerah sebagai memanasifestasikan atau praktek dari paradigma yang terbangun.

Politik lokal secara sederhana adalah praktek politik di tingkat lokal. Praktek politik secara faktual terkait dengan dinamika penyelenggaraan pemerintah dan dinamika peran masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pencapaian cita-cita. Secara umum politik lokal tidak bisa dilepaskan dari konteks politik nasional atau sistem politik yang dianut oleh suatu Negara. Menurut CSIS (2010) politik lokal adalah dinamika institusi-institusi politik di daerah dalam mengaktualisasikan interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dan memfunngsikan peran-peran yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi tersebut. Dalam konteks ini maka institusi-institusi politik lokal adalah dapat dikategorikan menjadi supra struktur politik dan infra struktur politik.

Di suatu Negara pasti akan adanya pemimpin yang mewakili Negara kita lebih baik akan tetapi dalam memilih pemimpin dan dalam proses akan ditetapkannya seorang pemimpin kita harus mengadakan pemilihan umum secara langsung maupun tidak langsung dalam Negara demokrasi merupakan indikator

implementasi penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang absah oleh rakyat, yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi yaitu dengan berpartisipasi masyarakat. Hal ini dalam pemilihan umum disuatu Negara maupun di daerah biasanya ada yang namanya partisipasi politik yaitu anggota masyarakat yang ikut andil dalam proses politik dimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan agar menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas serta bertanggung jawab, salah satu contoh dalam partisipasi politik masyarakat berhak mengambi bagian proses pemilihan dengan demikian tidak hanya untuk masyarakat biasa semata bahkan masyarakat yang berorganisasi lain bisa mengikutinya tidak hanya masyarakat dan organisasi saja dalam suatu partisipasi pesantren pun bisa ikut serta dalam berpartisipasi untuk pemilihan umum.

Untuk hal ini pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah. Ruangan untuk belajar dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pesantren merupakan sebuah pendidikan islam yang mempunyai budaya tersendiri, berperan penting di bidang sosial keagamaan, serta memandang bahwa pesantren merupakan pusat perubahan di bidang pendidikan, politik, budaya, sosial dan keagamaan. Dalam konteks ini pesantren juga dijadikan sebagai komoditas politik oleh pejabat atau politikus yang berkepentingan sehingga tidak heran dengan seringnya dikunjungi pada saat setiap kampanye oleh calon pejabat atau pun tim suksesnya.

Dan eksistensi pesantren bagi masyarakat tasikmalaya, layaknya seperti kulit dan daging pada tubuh manusia. Tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena itu tasikmalaya dikenal sebagai kota santri dan kabupaten pesantren terbesar di dunia. Hal ini disebabkan banyaknya pesantren di tasikmalaya (lebih dari 700 buah) dan kehidupan masyarakatnya yang agamis-religius. Pesantren dan Kyai nya, bagi masyarakat adalah panutan yang memiliki hubungan akidah atau keyakinan agama yang kuat. Karenanya pesantren dapat pula dipandang sebagai pusat perubahan masyarakat. (Hakim, 2004:91)

Dan karena itu seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa pesantren menjadi komoditas politik oleh politikus atau pejabat lainnya yang seringnya dikunjungi pada saat adanya pemilihan dan kampanye, oleh karena itu pesantren bisa menjadi salah satu yang mengikuti perpolitikan di Indonesia maupun di daerahnya karena pada era sekarang tidak hanya mengikuti voting untuk pemilihan umum saja bahkan sekarang banyak pesantren yang berpartisipasi dalam pemilihan contohnya dengan menjadi tim sukses ataupun mengikuti kampanye partai yang mereka ikuti atau percaya. Salah satu pesantrennya adalah pesantren Bahrul Ulum Tasikmalaya yang mana dalam pesantren tersebut Pondok pesantren Bahrul Ulum adalah pesantren pertama di wilayah Kecamatan Cibeureum ini berdiri sekitar 1920 dengan nama pondok pesantren Awipari. Pendirinya adalah KH. Masduki (Alm). Beliau merupakan putra KH. Husen, dari Tonjong, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan cucu dari salah seorang keluarga Syekh Abdul Muhyi Pamijahan.

Jika dulu penamaan pesantren itu langsung dengan menyebut tempat di mana pesantren itu berada dan sekarang berganti nama menjadi pondok pesantren

Bahrul Ulum KH. Busthomi, Awipari, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Dan Jumlah santri keseluruhan termasuk yang tidak mukim ada 580 orang sedangkan untuk santri keseluruhan yang mukim ada 574 orang. Dari tahun ke tahun santri yang masuk semakin meningkat Ada santri yang sedang menempuh pendidikan formal perguruan tinggi 15 orang, dan untuk santri keseluruhannya yaitu berasal dari wilayah pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Dalam hal ini pesantren Bahrul Ulum mempunyai pimpinan yang bernama KH. Cecep Ridwan Bustomi yang pernah terjun ke dunia perpolitikan beliau menjadi anggota DPRD di kota tasikmalaya tahun 2001-2004 dan menjadi Ketua DPRD Kota Tasikmalaya periode 2004-2009, dengan demikian pesantren Bahrul Ulum bisa dikatakan termasuk dalam masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam perpolitikan karena pemimpinnya sendiri pun sudah pernah terjun ke dunia perpolitikan maka dari itu secara tidak langsung membuat seluruh warga pesantren termasuk pengajar dewan santri maupun santri dan tidak tekecuali masyarakat disekitar pun yang berada di pesantren telah melakukan partisipasi politik.

Akan tetapi pesantren Bahrul Ulum untuk saat ini tidak ikut berpartisipasi dalam kampanye dari salah satu partai maupun calon tetapi itu berlaku jika ada setiap partai politik yang mencalonkan atau pun pejabat lainnya yang akan melakukan interaksi ataupun hanya sekedar bersilaturahmi dengan setiap orang agar mereka bisa meminta dukungannya begitupun kepada pihak pesantren yang memang notabene nya banyak santri muda yang mempunyai hak pilih, jadi pihak pesantren pernah melakukan komunikasi individu dengan para pejabat partai politik, dan komunikasi antar individu itu jika ada moment politik tokoh-tokoh

sering berdatangan untuk bersilaturahmi di Pesantren Bahrul Ulum maupun masyarakat disekitarnya, dan tokoh yang datang akan diberikan panggung untuk bersilaturahmi dengan warga pesantren pesantren Bahrul Ulum ataupun dengan masyarakat sekitar dengan cara adanya pengajian umum di majelista'lim dalam artian seperti pada saat jika ada pilkada dan atau pemilihan walikota. Di pesantren Bahrul Ulum bisa dikatakan adanya Partisipasi politik dan bukan hanya dipesantrennya saja masyarakat disekitarnya pun ikut dalam partisipasi politik, karena partisipasi politik itu tidak hanya melakukan pencoblosan saja ada banyak bentuk yang termasuk dalam partisipasi politik contohnya dengan adanya calon anggota pejabat yang sekedar bersilaturahmi saja dan pihak pesantren menerima dan melakukan pengajian ataupun berbincang-bincang siapapun tokoh pejabat atau calon pejabat yang datang itu termasuk dalam tingkatan partisipasi politik. Untuk itu alasan saya membawa penelitian ini karena pemimpin dari pondok pesantren Bahrul Ulum sekaligus Kyai merupakan mantan anggota DPRD kota tasikmalaya, tingkat partisipasi politik di pesantren Bahrul Ulum sebagai pemilik pesantren mungkin tak jarang yang pernah menjabat sebagai pejabat politik ini di katakana menurut warga pesantren santri maupun dewan santri dan keluarganya pun mendukung, dan selain itu di lingkungan pesantren ada tingkat partisipasi politiknya seperti adanya keikutsertaan keanggotaan yang aktif disuatu organisasi politik dan secara partisipasi seperti adanya kampanye tidak tunggal karena di keluarga tidak sendiri yang mencalonkan tetapi sebagian ada yang mencalonkan, tetapi santri yang ada di Bahrul Ulum pasti mengikuti partisipasi dalam mempromosikan atau mengikuti kampanye tetapi di sisi keluarga tidak semua dapat berpartisipasi karena dalam keluarga ada sebagian yang memang ikut

dalam pencalonan, dan di lingkungan keluarga pemilik pesantren pun berbeda dalam partainya, ada yang dari PKS, PKB dan termasuk pak KH. Ccep sendiri dulu pada saat menjabat dari PPP. Di dalam partisipasi rapat umum, demonstrasi pun ada karena secara langsung pesantren pernah terlibat dalam satu kasus bahwa disekeliling pesantren itu membiarkan adanya miras dan itu timbulnya dari media sosial bahwa disekitar Bahrul Ulum itu dibiarkan menjual miras sehingga membawa nama pesantren dengan demikian pernah mengadakan demonstrasi.

Partisipasi dalam diskusi politik informal umum dalam politik jika secara resmi tidak ada tetapi jika ada undangan atau menteri yang datang sering, seperti dari KPU ada penyuluhan dari kejaksaan dan juga dari dinas porli tetapi tidak membuka diskusi politik. Dalam tingkatan partisipasi politik ada yang menempati jabatan politik atau administrasi dalam lingkungan pesantren seperti kepala sekolah termasuk jabatan administrasi seperti kemenag ada dan dari DPR RI ada juga di pengadilan dan untuk sekarang secara jabatan di badang struktural ada di partai politik tapi secara birokrasi tidak, dalam keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik pun di pesantren Bahrul Ulum ada seperti ormas, dan keanggotaan paling banyak di NU hampir semua Kyai menjabat secara struktural di kota sebagian menjadi anggota dan sebagai suriah fidiah di NU

Maka dari itu saya ingin melihat bentuk partisipasi politik di Bahrul Ulum karena menurut penulis akan ada perbedaan, pemimpin yang pernah terjun langsung ke politik dan tidak terjun ke politik, karena pada saat pemilik pesantren Bahrul Ulum yaitu pak KH. Cecep Ridwan menjabat sebagai anggota DPRD.

Dengan adanya partisipasi politik di pesantren Bahrul Ulum kota tasikmalaya menjadikan motivasi bagi saya untunk mengadakan penelitian tentang partisipasi politik di pesantren Bahrul Ulum untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik yang ada di pesantren Bahrul ulum, maka dari itu saya sebagai penulis memilih judul “Bentuk Partisipasi Politik Pesantren Bahrul Ulum Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti. Bagaimana bentuk partisipasi politik pesantren Bahrul Ulum Kecamatan Cibeureum kota Tasikmalaya ?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu partisipasi politik di pesantren Bahrul Ulum kecamatan cibereum kota tasikmalaya.

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa saja bentuk partisipasi politik masyarakat di pesantren Bahrul Ulum kecamatan cibereum.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan atau kontribusi pada perkembangan ilmu politik serta member sumbangan pemikiran teori-teori dalam kaitannya dengan partisipasi politik, sehingga mendapatkan satu pengalaman antara teori dengan kenyataan dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana bentuk partisipasi politik di pesantren Bahrul Ulum kecamatan cibereum, sehingga dalam penelitian ini dapat memberikan informasi, kontribusi dan masukan kepada pengamat, para politikus dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam kajian dan pengembangan.